

ABSTRAK

Tesis berjudul “Dampak Pengawasan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Modernisasi Pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan” ini hasil penelitian penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Dalam rangka meningkatkan citra, kerja, dan kinerja menuju profesionalisme dan menunjang terciptanya *good governance*, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi yang dikenal dengan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern sejak bulan Juni 2007 sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-19/PJ./2007 tanggal 17 April 2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Seluruh Indonesia tahun 2007-2008.

Metodologi penelitian mencakup gambaran dan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan yang meliputi kelurahan Grogol, Tomang, Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren Selatan, Wijaya Kusuma, Jelambar Baru, dan Jelambar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif untuk memperoleh gambaran penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan dampaknya terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan sebelum dan sesudah modernisasi.

Perubahan pada modernisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) meliputi struktur organisasi, penempatan sumber daya manusia, aplikasi jaringan kerja yang digunakan, kode etik pegawai, dan lain sebagainya. Struktur organisasi KPP sebelum modern disusun berdasarkan jenis pajaknya, yaitu sedangkan KPP setelah modern dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi pelayanan, pengawasan dan konsultasi, penagihan, pemeriksaan, fungsional pemeriksa, pengolahan data dan informasi, serta sub bagian umum. Penempatan pegawai dilakukan setelah dilakukan mapping pegawai sesuai kemampuan dan keahlian akademisnya. Aplikasi yang digunakan sebelum modernisasi adalah Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan server di masing-masing KPP, setelah modernisasi beralih ke Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang servernya terpusat di Kantor Pusat DJP. Setelah modernisasi, kode etik pegawai semakin ditingkatkan pengawasannya.

Penerimaan pajak KPP dapat dilihat dari Laporan Penerimaan Pajak (LPP) yang dilaporkan setiap akhir tahun pajak ke Kantor Wilayah sebagai instansi vertikal di atas KPP. Dalam skripsi ini dibahas Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Sebelum Modernisasi, yaitu LPP Tahun 2005 dan 2006, Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Masa Transisi, yaitu LPP Tahun 2007, Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Setelah Modernisasi, yaitu LPP Tahun 2008.

Realisasi penerimaan pajak tahun 2005 tercapai Rp 819.375.180.485,00 atau 99,62% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp 822.510.530.000,00. Realisasi penerimaan pajak tahun 2006 tercapai Rp 881.111.959.269,00 atau 82,11% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp 1.073.025.510.000,00. Sedangkan pada masa transisi, realisasi penerimaan pajak tahun 2007 tercapai Rp 717.100.141.136,00 atau 73,65% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp 973.664.860.000,00. Hal ini

disebabkan terjadinya *potensial loss* sebesar Rp 298.237.704.093,00 atas penerimaan pajak dari 43 wajib pajak besar KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan yang dipindahkan ke KPP Madya Jakarta Barat pada bulan April 2007. Realisasi penerimaan pajak tahun 2008 tercapai Rp 607.987.003.359,00 atau 109,57% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp 554.892.043.871,00. Sebagai informasi, penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan tahun 2009 tercapai 118% dari rencana yang ditetapkan.

Dapat disimpulkan bahwa modernisasi yang diterapkan di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan memberi dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak dan pelayanan terhadap wajib pajak. Pelayanan terhadap wajib pajak lebih terfokus karena masing-masing wajib pajak mempunyai *Account Representative* yang telah ditunjuk untuk petugas pengawasan dan konsultasi. Seluruh pelaporan pajak dan surat lain wajib pajak dilakukan dengan sistem online di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Akan tetapi penggalan potensi secara intensifikasi maupun ekstensifikasi kepada wajib pajak tetap ditingkatkan dan diimbangi dengan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak serta upaya terobosan dan perlu adanya inovasi baru dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya.



Jakarta, 27 Agustus 2011

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Shinta Permata Sari